



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

## Penentuan Tarif APTB

# Dinas Perhubungan dan Organda Saling Menyalahkan

Jalan tengahnya melalui lelang.

Rini Kustiani

kustiani@tempo.co.id

**JAKARTA** — Pemerintah DKI Jakarta dan Organisasi Gabungan Angkutan Darat saling menyalahkan ihwal penentuan tarif rupiah per kilometer bagi Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). “Kami tidak pernah diajak berdiskusi dalam penghitungan tarif,” kata Ketua Organda DKI Jakarta, Safruhan Sinungan di Jakarta Timur, kemarin. Organda, yang menjadi perwakilan operator APTB, menurut dia, tidak pernah menolak rencana pemberlakuan tarif Rp 14-15 ribu per kilometer seperti yang ditawarkan pemerintah DKI.

Safruhan menjelaskan, dalam pertemuan terakhir Organda dengan operator angkutan perbatasan dengan Dinas Perhubungan dan PT Transportasi Jakarta—badan usaha milik daerah yang akan menaungi APTB—mendadak sistem tarif per kilometer dihilangkan dan mereka hanya diberi dua opsi. “Ini di luar dugaan kami,” kata dia. (Baca: Negosiasi Opsi Rugi)

Adapun Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Benjamin Bukit membantah jika disebut tak pernah melibatkan pihak terkait dalam pembahasan tarif. Dia balik menuduh Organda, dan operator angkutan perbatasan meminta opsi tambahan agar pemerintah DKI tetap memba-

yar sistem tarif per kilometer. “Mereka minta lebih, biasalah, biar tetap dibayar,” ujar Benjamin. Lantaran tak tercapai titik temu, opsi tarif per kilometer dihapus.

Pemerintah DKI kemudian memberi dua pilihan bagi Organda dan operator. Pertama, APTB boleh masuk ke jalur Transjakarta dan mengangkut penumpang tadi dilarang memungut ongkos, dan pemerintah DKI tak membayar rupiah per kilometer. Kedua, APTB hanya dibolehkan beroperasi sampai perbatasan atau halte terakhir Transjakarta. Akhirnya opsi kedua dipilih.

Safruhan menilai opsi pertama ataupun kedua sama-sama bikin operator rugi. “Tapi opsi pertama lebih besar ruginya,” kata dia. Meski sempat menawar tarif menjadi Rp 18 ribu per kilometer, Safruhan mengaku, jika diberi Rp 12 ribu per kilometer pun operator akan menerima.

Direktur Bianglala—salah satu operator APTB—Wahid Sukamto mengatakan keputusan pengoperasian APTB hanya sampai perbatasan pasti berdampak pada penumpang. “Kami ingin seperti sekarang saja, bisa masuk jalur Transjakarta,” katanya.

Direktur Institute for Transportation and Development Policy Indonesia, Yoga Adiwinarto, menilai penetapan tarif per kilometer bagi APTB seharusnya melalui proses lelang operator. “Bukan negosiasi,” ujarnya. “Jika mereka tidak mau ikut lelang,

maka cabut izinnya dan ganti dengan operator baru.”

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah siap menghadapi penumpang yang marah jika angkutan yang mereka tumpangi hanya sampai wilayah perbatasan. “Silakan marah dengan saya. Saya sudah biasa dicaci-maki,” kata dia.

● ERWAN HERMAWAN | YOLANDA RYAN | MAYA NAWANGWULAN



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----

2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

## NEGOSIASI OPSI RUGI

Penentuan tarif per kilometer untuk Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway batal. Akibatnya, mulai pekan depan armada APTB dilarang masuk jalur Transjakarta. Bus itu harus berhenti di perbatasan wilayah.

Keputusan ini merupakan pilihan bagi operator APTB. Perhitungan investasi mereka meleset. Operator yang membeli bus seharga Rp 2 miliar itu mestinya balik modal dalam tempo tujuh tahun. Namun kini mereka harus menunggu lebih lama lagi. Belum lagi biaya operasional Rp 5 juta per unit setiap hari.

Berikut ini asal mula munculnya negosiasi yang diklaim membuat operator APTB rugi.

66

“Dikasih Rp 12 ribu per kilometer saja kami mau.”

Ketua Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta Safruhan Sinungan

“Mereka minta lebih, biasa lah, biar tetap dibayar.”

Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Benjamin Bukit

99

### ► 15 Januari 2015

Dinas Perhubungan DKI menjelaskan perubahan sistem angkutan umum kepada Organda dan operator APTB. Operator harus tergabung dalam manajemen BUMD PT Transportasi Jakarta dan mendapat bayaran dengan tarif rupiah per kilometer.

### ► 3 Februari 2015

Operator APTB sepakat tarif yang akan diajukan ke pemerintah DKI sebesar Rp 17-18 per kilometer. Pemerintah juga mengajukan tarif Rp 14-15 ribu per kilometer. Dalam pertemuan ini, operator tak menolak tarif pemerintah.

### ► 6 April 2015

Pemerintah menilai Organda dan operator tak kooperatif. Dinas Perhubungan dan PT Transportasi Jakarta langsung menyodorkan dua opsi kepada Organda dan operator.

Pertama, APTB boleh masuk ke jalur Transjakarta dan mengangkut penumpang tapi dilarang memungut ongkos dan pemerintah DKI tak membayar rupiah per kilometer. Kedua, APTB hanya boleh beroperasi sampai perbatasan atau halte terakhir Transjakarta. Opsi kedua dipilih.

ERWAN HERMAWAN | YOLANDA RYAN